# RANCANGAN AKHIR
# RENCANA KERJA
# TAHUN 2026




**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
**KABUPATEN NGANJUK**
Jl. Mastrip II No. 30 Nganjuk Kode pos 64419
Telephon (0358) 321704 Faks (0358) 321704
e-mail : perpustakaan_arsip@nganjukkab.go.id

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : TAHUN 2025g
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

# RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

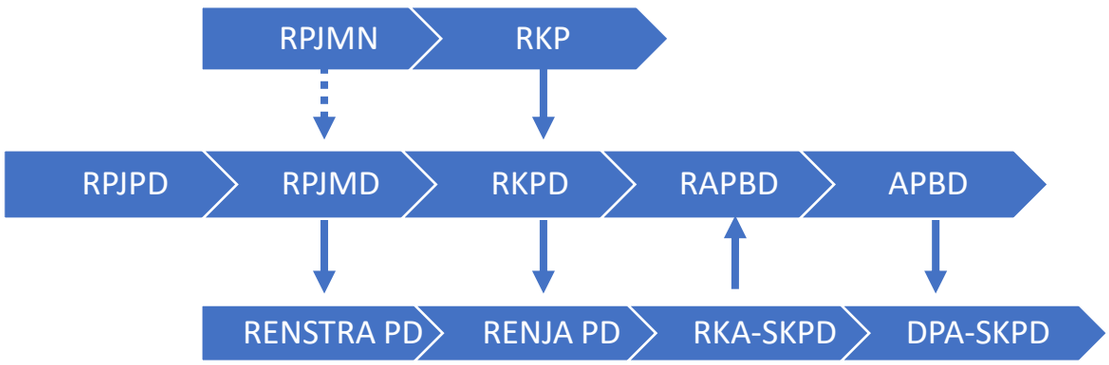
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran




Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada tahun ke-3 (ketiga) periode tahun 2026; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 didasarkan pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan IV Tahun 2024
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA**
**RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK**
**PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

P

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026 | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penang-gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 12/7 | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5*100% | | 16 |
| | | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | **Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Persentase Kunjungan Perpustakaan** | **10** | | **3.839.060.000** | | **646.629.900** | | **1.560.817.008** | | **97.957.566** | | **273.948.208** | | **300.913.127** | | **720.192.502** | | **1.424.637.681** | | 91% | | **2.071.267.581** | | 54% | |
| | | ***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota*** | ***Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan*** | **30** | **Perpustakaan** | **2.701.100.000** | | **570.256.000** | | **1.312.278.358** | | **40.501.066** | | **273.948.208** | | **298.789.127** | | **486.860.402** | | **1.191.241.081** | | 91% | | **1.761.497.081** | | **65%** | |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Layanan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik yang dokembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO 20000 | 3 | layanan | 135.000.000 | 0 | | 1 | 337.730.030 | | | 0 | 236.343.500 | 1 | - | | 14.160.900 | 1 | 250.504.400 | 1 | 74% | 1 | 250.504.400 | 0,3333 | **186%** | |
| | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kab/kota sesuai SNP di Wilayah kab/Kota sesuai kewenangannya | 30 | Perpustakaan | 578.600.000 | 10 | 194.114.000 | 10 | 289.663.000 | 3 | 36.591.000 | 3 | 16.183.470 | 4 | 72.092.498 | | 152.628.984 | 10 | 277.495.952 | 1 | 96% | 20 | 471.609.952 | 0,6667 | **82%** | |
| | | Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar seluruh wilayah kab/kota sesuai SNP | Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP | 65 | Perpustakaan | 383.500.000 | 0 | | 25 | 46.674.778 | | | | - | 22 | 11.376.000 | | 30.299.978 | 22 | 41.675.978 | 0,88 | 89% | 22 | 41.675.978 | 0,3385 | **11%** | |
| | | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota | Jumlah perpustakaan khusus yang dilalkukan pembinaan dalam mewujudkan SNP | 30 | Perpust. | 36.000.000 | 5 | 16.000.000 | 10 | 14.000.000 | | | | 1.021.100 | 10 | 11.835.400 | | - | 10 | 12.856.500 | 1 | 92% | 15 | 28.856.500 | 0,5 | **80%** | |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota. | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota | 150 | orang | 368.000.000 | 50 | 22.883.000 | 50 | 187.861.050 | | | | - | 100 | - | | 181.171.050 | 100 | 181.171.050 | 2 | 96% | 150 | 204.054.050 | 1 | **55%** | |
| | | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan | 3855 | eksemplar | 620.000.000 | 2000 | 178.491.000 | 1285 | 295.197.500 | | 345.000 | | 2.228.750 | 2559 | 195.315.435 | | 93.569.250 | 2559 | 291.458.435 | 1,99144 | 99% | 4559 | 469.949.435 | 118% | **76%** | |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | 9000 | eksemplar | 210.000.000 | 3000 | 50.245.500 | 3000 | 45.576.000 | 1000 | 160.000 | | 18.171.388 | 1200 | 8.169.794 | | 15.030.240 | 2200 | 41.531.422 | 0,73333 | 91% | 5200 | 91.776.922 | 0,5778 | **44%** | |
| | | Penyusunan Data Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kbupaten/Kota | Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pusatakawan tingkat daerah Kab/Kota | 3 | dokumen | 370.000.000 | 1 | 108.522.500 | 1 | 95.576.000 | | 3.405.066 | 1 | 10.327.992 | 1 | 68.532.962 | | 12.281.324 | 2 | 94.547.344 | 2 | 99% | 3 | 203.069.844 | 1 | **55%** | |
| | | ***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah lembaga yang mendapat pembinaan pembudataan gemar membaca*** | **10** | **Perpust.** | **1.137.960.000** | | **76.373.900** | | **248.538.650** | | **57.456.500** | | - | | **2.124.000** | | **173.816.100** | | **233.396.600** | | 94% | 0 | **309.770.500** | | **27%** | |
| | | Sosialisasi Budaya dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 15 | lokus | 375.960.000 | | | 5 | 50.000.000 | | | | - | 5 | - | | 48.191.050 | 5 | 48.191.050 | 1 | 96% | 5 | 48.191.050 | 0,3333 | **13%** | |
| | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota | 1260 | orang | 312.000.000 | 24 | 15.000.000 | 420 | 67.763.600 | 420 | 57.456.500 | 0 | - | 0 | 2.124.000 | 0 | 1.350.000 | 420 | 60.930.500 | 1 | 90% | 444 | 75.930.500 | 35% | **24%** | |
| | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan | 30 | perpust. | 420.000.000 | 0 | | 10 | 50.000.000 | | | | - | | - | | 45.025.000 | 0 | 45.025.000 | 0 | 90% | 0 | 45.025.000 | 0 | **11%** | |
| | | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah duta baca tingkat daerah Kab/kota yg dipilih dan didukung kegiatannya | 13 | orang | 30.000.000 | 10 | 61.373.900 | 3 | 80.775.050 | | - | | - | 0 | - | | 79.250.050 | 0 | 79.250.050 | 0 | 98% | 10 | 140.623.950 | 0,7692 | **469%** | |

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penang-gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Persentase Koleksi Kuno milik daerah yang dilestarikan** | **100** | **151.000.000** | | - | | **87.794.000** | | - | | - | | - | | **48.309.000** | | **48.309.000** | | 55% | | **48.309.000** | | **32%** | |
| | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koleksi naskah kuno milik daerah yang dilestarikan | 4 | 76.000.000 | | - | 2 | 62.827.000 | | - | | - | | - | | 37.102.000 | 0 | 37.102.000 | 0 | 59% | 0 | 37.102.000 | 0 | **49%** | |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno | jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan,perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 249 orang | 46.000.000 | | | 83 | 11.000.000 | | | | - | | - | | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 | 98% | 0 | 10.800.000 | 0 | **23%** | |
| | | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarian dan didayagunakan | Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarian dan didayagunakan | 3 naskah kuno | 30.000.000 | | | 1 | 51.827.000 | | | | - | | - | | 26.302.000 | 0 | 26.302.000 | 0 | 51% | 0 | 26.302.000 | 0 | **88%** | |
| | | **Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kab/kota** | **Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan** | | **75.000.000** | | | | **24.967.000** | | - | | - | | - | | **11.207.000** | | **11.207.000** | | 45% | | **11.207.000** | | **15%** | |
| | | Seleksi dan Pengadaan Budaya etnis nusantara | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan penugasan | 3 | 75.000.000 | | | 1 | 24.967.000 | | | | - | | - | | 11.207.000 | 0 | 11.207.000 | 0 | 45% | 0 | 11.207.000 | 0 | **15%** | |
| 2 | **Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | **77,65** | **11.084.031.575** | | **3.403.439.101** | | **7.462.597.428** | | **485.729.016** | | ########## | | **1.697.341.448** | | **3.087.293.667** | | **7.010.489.994,57** | | 94% | | ########## | | 94% | |
| | | ***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*** | | **180.000.000** | | **36.287.607** | | **79.235.500** | | **1.902.871** | | **9.755.066** | | **22.871.332** | | **44.391.899** | | **78.921.168,00** | | 100% | | **115.208.775** | | 64% | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 30.000.000 | 1 | 11.121.948 | 1 | 13.400.000 | 1 | 1.902.871 | 2 | 7.851.519 | | | | 3.539.000 | 3 | 13.293.390 | 3 | 99% | 4 | 24.415.338 | 1,3333 | 81% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | 3 laporan | 30.000.000 | 2 | 4.096.000 | 1 | 10.000.000 | 0 | - | 0 | | 0 | | 1 | 9.960.033 | 1 | 9.960.033 | - | 100% | 3 | 14.056.033 | 1 | 47% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA /SKPD | Jumah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA /SKPD | 3 laporan | 30.000.000 | 1 | 2.941.000 | 1 | 15.835.500 | 0 | - | 0 | | 0 | | 1 | 15.804.533 | 1 | 15.804.533 | - | 100% | 2 | 18.745.533 | 0,6667 | 62% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasilk koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 24 laporan | 90.000.000 | 8 | 18.128.659 | 8 | 40.000.000 | 0 | - | 1 | 1.903.547 | 5 | 22.871.332 | 2 | 15.088.333 | 8 | 39.863.212 | - | 100% | 16 | 57.991.871 | 0,6667 | 64% | |
| | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*** | | **87.000.000** | | **2.477.698.948** | | **3.257.570.000** | | **348.831.164** | | **911.698.180** | | **1.133.222.441** | | **734.108.815** | | **3.127.860.600** | | 96% | | **5.605.559.548** | | 6443% | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 60 orang | 12.000.000 | 17 | 2.468.564.711 | 25 | 3.232.570.000 | 25 | 345.655.449 | 25 | 907.783.338 | 25 | 1.128.373.941 | 25 | 721.580.782 | 100 | 3.103.393.510 | 17 | 96% | 117 | 5.571.958.221 | 1,95 | 46433% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap. keuangan akhir tahun SKPD | 3 laporan | 30.000.000 | 1 | 4.142.237 | 1 | 10.000.000 | 1 | 3.175.715 | 2 | 3.914.842 | | - | | 2.394.500 | 3 | 9.485.057 | 3 | 95% | 4 | 13.627.294 | 1,3333 | 45% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/ Semeteran SKPD | Jumlah laporann keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan lap. Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | 15 laporan | 45.000.000 | 5 | 4.992.000 | 5 | 15.000.000 | 0 | - | 0 | - | 3 | 4.848.500 | 2 | 10.133.533 | 5 | 14.982.033 | 1 | 100% | 10 | 19.974.033 | 0,6667 | 44% | |

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penang-gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | ***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*** | ***Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*** | | **30.000.000** | | **4.145.950** | | **9.420.250** | | - | | - | | **2.246.000** | | **7.138.250** | | **9.384.250** | | 100% | | **13.530.200** | | 45% | |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 6 laporan | 30.000.000 | 2 | 4.145.950 | 2 | 9.420.250 | 0 | | 0 | - | 1 | 2.246.000 | 1 | 7.138.250 | 2 | 9.384.250 | 1 | 100% | 4 | 13.530.200 | 0,6667 | 45% | |
| | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Laporan pelaksana tugas perangkat daerah yang disusun*** | | **893.500.000** | | **316.426.641** | | **516.022.838** | | **38.643.600** | | **95.258.420** | | **118.650.559** | | **232.576.148** | | **485.128.727** | | 94% | | **801.555.368** | | 90% | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 paket | 85.000.000 | 6 | 10.858.425 | 6 | 55.073.288 | | | 2 | 6.706.400 | 1 | 3.457.600 | 3 | 42.227.510 | 6 | 52.391.510 | 1 | 95% | 12 | 63.249.935 | 2 | 74% | |
| | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 15 paket | 30.000.000 | | | 5 | 56.262.850 | | | 2 | 13.071.000 | 1 | 909.000 | 2 | 39.878.550 | 5 | 53.858.550 | 1 | 96% | 5 | 53.858.550 | 0,3333 | 180% | |
| | | Penyediaan peralatan rumah tangga | tersediannya peralatan rumah tangga | 26 paket | 22.500.000 | | | 7 | 15.565.200 | | | 2 | 6.390.500 | 2 | 4.357.578 | 3 | 3.644.100 | 7 | 14.392.178 | 1 | 92% | 7 | 14.392.178 | 0,2692 | 64% | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 37 paket | 255.000.000 | 37 | 60.533.050 | 37 | 71.794.600 | 8 | 14.660.600 | 8 | 17.148.250 | 10 | 20.994.694 | 11 | 17.395.050 | 37 | 70.198.594 | 1 | 98% | 74 | 130.731.644 | 200% | 51% | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 9 paket | 36.000.000 | 9 | 5.594.320 | 9 | 10.719.900 | 2 | 1.555.000 | 1 | 906.000 | 4 | 4.324.700 | 2 | 2.879.300 | 9 | 9.665.000 | 1 | 90% | 18 | 15.259.320 | 200% | 42% | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen | 35.000.000 | 12 | 4.440.000 | 12 | 10.000.000 | 2 | 840.000 | 3 | 1.260.000 | 3 | 1.260.000 | 4 | 1.680.000 | 12 | 5.040.000 | 1 | 50% | 24 | 9.480.000 | 200% | 27% | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 8 laporan | 50.000.000 | 8 | 10.235.400 | 8 | 22.152.000 | 2 | 2.226.000 | 2 | 3.217.500 | 3 | 7.489.725 | 1 | 4.674.250 | 8 | 17.607.475 | 1 | 79% | 16 | 27.842.875 | 2 | 56% | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 laporan | 380.000.000 | 12 | 224.765.446 | 12 | 274.455.000 | 3 | 19.362.000 | 3 | 46.558.770 | 3 | 75.857.262 | 3 | 120.197.388 | 12 | 261.975.420 | 1 | 95% | 24 | 486.740.866 | 2 | 128% | |
| | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | | **7.162.144.855** | | **43.300.000** | | **2.181.178.700** | | - | | **536.607.340** | | **279.890.000** | **5** | **1.188.232.513** | | **2.004.729.852,57** | | 92% | | **2.048.029.853** | | 29% | |
| | | Pengadaan Mebel | jumlah paket mebel yang disediakan | 21 unit | 2.700.000.000 | | | 7 | 426.304.150 | | | 5 | 173.168.840 | 0 | - | 2 | 231.519.480 | 7 | 404.688.320 | 1 | 95% | 7 | 404.688.320 | 0,3333 | 15% | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 243 unit | 4.162.144.855 | 1 | 43.300.000 | 25 | 850.228.700 | | | 16 | 363.438.500 | 7 | 202.752.500 | 2 | 236.050.000 | 25 | 802.241.000 | 1 | 94% | 26 | 845.541.000 | 0,107 | 20% | |
| | | pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 15 unit | 300.000.000 | | | 1 | 904.645.850 | | | | - | 0 | 77.137.500 | 1 | 720.663.033 | 1 | 797.800.533 | 1 | 88% | 1 | 797.800.533 | 0,0667 | 266% | |
| | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | | **1.236.000.000** | | **289.244.194** | | **527.054.240** | | **68.862.705** | | **117.314.805** | | **80.375.064** | 29 | **218.698.140** | | **485.250.714** | | 92% | | 774.494.908 | | 63% | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 laporan | 6.000.000 | 7 | 2.244.000 | 7 | 3.000.000 | 2 | 250.000 | 2 | 1.020.000 | 2 | 1.670.000 | 6 | 60.000 | 12 | 3.000.000 | 1,71429 | 100% | 19 | 5.244.000 | 0,5278 | 87% | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 750.000.000 | 12 | 151.050.952 | 12 | 204.000.000 | 3 | 39.561.769 | 3 | 37.791.228 | 3 | 33.333.768 | 9 | 79.894.433 | 18 | 190.581.198 | 1,5 | 93% | 30 | 341.632.150 | 2,5 | 46% | |
| | | penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 9 laporan | 30.000.000 | | | 9 | 5.950.000 | 1 | 627.000 | 3 | 4.000.000 | 1 | 300.000 | 5 | 225.000 | 10 | 5.152.000 | 1,11111 | 87% | 10 | 5.152.000 | 1,1111 | 17% | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 450.000.000 | 12 | 135.949.242 | 12 | 314.104.240 | 3 | 28.423.936 | 3 | 74.503.577 | 3 | 45.071.296 | 9 | 138.518.707 | 18 | 286.517.516 | 1,5 | 91% | 30 | 422.466.758 | 2,5 | 94% | |
| | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | | **1.495.386.720** | | **236.335.761** | | **892.115.900** | | **27.488.676** | | **69.492.053** | | **60.086.052** | **19** | **662.147.902** | | **819.214.683** | | 92% | | **1.055.550.444** | | 71% | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 17 unit | 735.386.720 | 16 | 157.787.771 | 16 | 219.596.500 | 2 | 25.435.676 | 4 | 49.357.053 | 5 | 31.131.052 | 5 | 77.826.623 | 16 | 183.750.404 | 1 | 84% | 32 | 341.538.175 | 1,8824 | 46% | |

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026 | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penang-gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Mebel | Terlaksanannya pemeliharaan mebel | 50 | unit | 30.000.000 | 30 | 9.999.990 | 30 | 20.000.000 | | | 25 | 9.000.000 | 0 | - | 5 | 10.850.000 | 30 | 19.850.000 | 1 | 99% | 60 | 29.849.990 | 1,2 | 99% | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 38 | unit | 320.000.000 | 38 | 30.798.000 | 38 | 71.226.200 | 2 | 2.053.000 | 19 | 11.135.000 | 10 | 8.975.000 | 7 | 34.878.000 | 38 | 57.041.000 | 1 | 80% | 76 | 87.839.000 | 2 | 27% | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 | unit | 410.000.000 | 3 | 37.750.000 | 3 | 581.293.200 | | | | - | 1 | 19.980.000 | 2 | 538.593.279 | 3 | 558.573.279 | 1 | 96% | 6 | 596.323.279 | 2 | 145% | |
| **3** | **Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Daerah** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Meningkatnya Kepatuhan PD Terhadap Kebijakan Kearsipan** | **52** | **OPD** | **1.275.200.000** | | **470.699.276** | | **404.604.100** | **337** | **64.435.160** | | **80.653.516** | | **57.816.397** | | **177.538.445** | **337** | **380.443.518** | | **94%** | | **851.142.794** | | **67%** | |
| | | ***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah PD yang Patuh Terhadap Kebijakan Pengelolaan Arsip*** | **50** | **OPD** | **495.000.000** | - | **96.155.450** | **937** | **194.248.900** | **225** | **36.769.500** | **140** | **57.190.200** | **347** | **15.841.200** | **225** | **72.964.700** | **937** | **182.765.600** | | **94%** | | **278.921.050** | | **56%** | |
| | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Terkelolanya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | 2752 | berkas | 30.000.000 | | | 20 | 7.499.950 | 0 | - | 0 | - | 20 | 1.199.950 | 0 | 4.950.000 | 20 | 6.149.950 | 100% | 82% | 20 | 6.149.950 | 0,0073 | 20% | |
| | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah volume arsip dinamis dan statis yang diadakan pemeliharaan | 1944 | m3 | 245.000.000 | 28.703 | 17.251.100 | 900 | 104.749.250 | 225 | 34.372.500 | 140 | 5.082.500 | 310 | 9.786.250 | 225 | 47.736.000 | 900 | 96.977.250 | 100% | 93% | 29.603 | 114.228.350 | 15,228 | 47% | |
| | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota | Nilai kepatuhan PD terhadap kebijakan kearsipan | 70 | | 220.000.000 | 36 | 78.904.350 | 17 | 81.999.700 | 0 | 2.397.000 | 0 | 52.107.700 | 17 | 4.855.000 | 0 | 20.278.700 | 17 | 79.638.400 | 100% | 97% | 53 | 158.542.750 | 0,7571 | 72% | |
| | | ***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Peningkatan arsip statis yang dibuatkan sarana temu balik*** | 9 | daftar | **355.200.000** | 1.151 | **104.876.782** | **615** | **81.168.550** | **100** | **17.962.080** | **150** | **14.304.908** | **175** | **16.436.799** | **125** | **27.313.965** | **550** | **76.017.752** | | **94%** | | **180.894.534** | | **51%** | |
| | | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga pada ANRI | Jumlah daftar salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI | 3 | daftar | 130.000.000 | 150 | 13.431.200 | 50 | 11.634.550 | | 900.000 | 50 | 2.839.000 | 0 | 229.200 | 0 | 6.765.050 | 50 | 10.733.250 | 100% | 92% | 200 | 24.164.450 | 66,667 | 19% | |
| | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah arsip statis yang dikelola dan dibuat daftar yemu balik | 9 | daftar, naskah | 225.200.000 | 1001 | 91.445.582 | 500 | 69.534.000 | 100 | 17.062.080 | 100 | 11.465.908 | 175 | 16.207.599 | 125 | 20.548.915 | 500 | 65.284.502 | 100% | 94% | 1.501 | 156.730.084 | 166,78 | 70% | |
| | | ***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/kota*** | ***Jumlah arsip statis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN*** | **12** | **daftar** | **425.000.000** | 1.212 | **269.667.044** | **65** | **129.186.650** | **12** | **9.703.580** | **8** | **9.158.408** | **29** | **25.538.398** | **16** | **77.259.780** | **65** | **121.660.166** | | **94%** | | **391.327.210** | | **92%** | |
| | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah Khasanah arsip yang dipublikasikan dan pemasyarakatan arsip | 3450 | berkas, kali pemasyarakat arsip | 276.000.000 | 1200 | 47.131.844 | 50 | 80.011.700 | 12 | 7.203.580 | 8 | 7.213.408 | 17 | 23.024.398 | 13 | 37.745.330 | 50 | 75.186.716 | 100% | 94% | 1.250 | 122.318.560 | 0,3623 | 44% | |
| | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan kapasitas pemberdayaan | 50 | OPD | 149.000.000 | 12 | 222.535.200 | 15 | 49.174.950 | | 2.500.000 | 0 | 1.945.000 | 12 | 2.514.000 | 3 | 39.514.450 | 15 | 46.473.450 | 100% | 95% | 27 | 269.008.650 | 0,54 | 181% | |
| 4 | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan** | **100%** | | **252.000.000** | | **13.492.000** | | **36.999.550** | - | - | - | **379.800** | **139** | **8.625.450** | **3** | **21.584.500** | **142** | **30.589.750** | | **83%** | | **44.081.750** | | **17%** | |
| | | ***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun*** | ***Jumlah Berkas yang dinilai, ditetapkan dan dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 tahun*** | **402** | **berkas** | **120.000.000** | | **13.492.000** | **268** | **24.999.750** | - | - | - | - | **134** | **3.024.450** | - | **16.339.500** | **134** | **19.363.950** | | **77%** | | **32.855.950** | | **27%** | |
| | | Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 tahun | Jumlah berkas yang dinilai | 402 | berkas | 75.000.000 | 1500 | 13.492.000 | 134 | 24.999.750 | | | 0 | - | 134 | 3.024.450 | 0 | 16.339.500 | 0 | 19.363.950 | 0% | 77% | 1.500 | 32.855.950 | 3,7313 | 44% | |
| | | Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10tahun | jumlah berkas yang dimusnahl | 402 | berkas | 45.000.000 | | | 134 | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | - | 0 | 0% | |
| | | **Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kab/kota** | **Jumlah berkas arsip yang ditetapkan dan dinyatakan hilang** | **15** | **berkas** | **36.000.000** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** | - | | 0% | | - | | 0% | |
| | | Penilaian dan penetaan autentifikasi arsip statis sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip | Jumlah berkas yang ditetap dan dinyatakan hilang | 15 | berkas | 36.000.000 | | | 0 | - | | | 0 | - | 0 | - | | - | 0 | - | 0% | 0% | - | - | 0 | 0% | |
| | | **Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang** | **Prosentase Berkas Yang Dinyatakan Hilang** | **100** | **berkas** | **96.000.000** | | - | **5** | **11.999.800** | - | - | - | **379.800** | **5** | **5.601.000** | **5** | **5.245.000** | **10** | **11.225.800** | | **94%** | | **11.225.800** | | **12%** | |

| No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 - 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penang-gung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | Penilaian dan penetapan autentifikasi arsip statis yang dinyatakan hilang | Jumlah berkas yang ditetapkan dan dinyatakan hilang | 15 berkas | 30.000.000 | | | 0 | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | - | 0 | 0% | |
| | | evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang | Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penataan hasil alih media yang dinyatakan hilang | 15 arsip | 30.000.000 | | | 0 | - | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | - | - | 0 | 0% | |
| | | Penetapan dan Pengumuman daftar pencarian arsip(DPA) | Jumlah berkas yang ditetapkan dan dinyatakan hilang | 15 berkas | 36.000.000 | | | 5 | 11.999.800 | | | 0 | 379.800 | 5 | 5.601.000 | 5 | 5.245.000 | 10 | 11.225.800 | 200% | 94% | 10 | 11.225.800 | 0,6667 | 31% | |
| 5 | | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **Prosentase penggunaan arsip yang bersifat tertutup** | **100 persen** | **78.000.000** | | - | | **24.999.000** | - | - | - | **7.851.000** | **12** | - | **12** | **15.975.000** | **24** | **23.826.000** | | **95%** | | **23.826.000** | | **31%** | |
| | | **Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kab/kota** | **Prosentase layanan penggunaan arsip yang bersifat tertutup** | **100 persen** | **78.000.000** | | - | **12** | **24.999.000** | - | - | - | **7.851.000** | **12** | - | **12** | **15.975.000** | **24** | **23.826.000** | | **95%** | | **23.826.000** | | **31%** | |
| | | Penyusunan dan penetapan SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Terlaksananya Penyusunan dan penetapan SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup | 9 SOP | 30.000.000 | | | 7 | 9.999.100 | | | 0 | 2.799.100 | 7 | - | 7 | 7.200.000 | 14 | 9.999.100 | 200% | 100% | 14 | 9.999.100 | 1,5556 | 33% | |
| | | Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Jumlah layanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup | 30 layanan | 48.000.000 | | | 5 | 14.999.900 | | | 0 | 5.051.900 | 5 | - | 5 | 8.775.000 | 10 | 13.826.900 | 200% | 92% | 10 | 13.826.900 | 0,3333 | 29% | |

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| 1. | **≥ 91%** | Sangat Tinggi |
| 2. | **76% ≤ 90%** | Tinggi |
| 3. | **66% ≤ 75%** | Sedang |
| 4. | **51% ≤ 65%** | Rendah |
| 5. | **≤ 50%** | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

| Program Perangkat Daerah | Capaian Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 95,3% | Sangat Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Penilaian SAKIP di tribulan II | 74 | Akan meningkatkan kinerja Dinas |
| Program pembinaan perpustakaan | 421,2% (136.405 Kunjungan) | Sangat Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Pelaksanaan kegiatan pelayanan sudah berjalan dengan maksimal | Sudah Tercapai | Akan berinovasi untuk lebih meningkatkan pelayanan |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 100% | Sangat Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Pelaksanaan kegiatan pelayanan sudah berjalan dengan maksimal | Sudah Tercapai | Akan lebih meningkatkan kinerja |
| Program Pengelolaan Arsip | 100% | Sangat Tinggi |

| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
|---|---|---|
| Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip sudah berjalan dengan maksimal | Sudah sesuai dengan target | Akan lebih meningkatkan kinerja |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 100% | Sangat Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip sudah berjalan dengan maksimal | Sudah sesuai dengan target | Akan lebih meningkatkan kinerja |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 – 2026 Adapun 16able pelayanan meliputi :

a. Pelayanan dalam rangka peningkatan tata 16able16 kearsipan yang baku dengan bentuk layanan berupa :
   - Layanan Ing Galeri Nganjuk Sinau Arsip (Nganjuk SIP)
   - Layanan Penyelenggaraan SIKN/JIKN
   - Layanan Pemindahan Arsip Inaktif
   - Layanan Penyerahan Arsip Statis
b. Pelayanan dalam rangka peningkatan pengunjung perpustakaan daerah, dengan bentuk layanan berupa :
   - Layanan Perpustakaan Keliling
   - Layanan Dongkel Beras (Dongeng Keliling Bersama Anak Sekolah)
   - Layanan Martabak (Membaca Ragam Cerita 16able16a Anak)

Dari pelayanan Perangkat Daerah Kab Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk dapat dilihat sebagaimana 16able berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Renstra PD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Persentase peningkatan pemustaka | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42,12 | | | | | |
| 2 | Persentase peningkatan perangkat daerah yang melaksanakan tertib pengelolaan arsip | 73,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73,07 | | | | | |

Tabel 2.5

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

| No | Indikator | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 62,45 | 77,26 |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | - | 42,08 |
| 3 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | - | 85 |
| 4 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 100 | 100 |
| 5 | Indeks Hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah | - | 90,02 |

## 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu – isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1 Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kaidah dan standar yang baku (NSPK)
2. Optimalisasi kunjungan perpustakaan
3. Penguatan Sumber Daya Kearsipan
4. Digitalisasi arsip

2.4 Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas

2.5. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan perpustakaan masih belum sesuai NSPK
2. Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
3. Masih terdapat pengelolaan arsip yang belum sesuai NSPK
4. Masih terdapat pengelolaan arsip secara konvensional

2.7. Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk adalah semua Perangkat Daerah di kab Nganjuk dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan, sebagai koordinator pengelolaan digitalisasi kearsipan (aplikasi Srikandi) serta pelayanan jasa perpustakaan untuk masyarakat umum tanpa terkecuali.

2.8. Dukungan sekolah dengan melakukan kerjasama melalui gerakan Literasi Sekolah dalam rangka meningkatkan capaian kinerja nilai tingkat kegemaran membaca.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2025-2029 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah

| Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Tujuan | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Kinerja-Sasaran Perangkat Daerah | Program Perangkat Daerah | Outcome Program | Unit Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | | | | | | |
| Meningkatnya kegemaran membaca | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Meningkatnya layanan perpustakaan | Persentase peningkatan pemustaka | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan | Sekretariat |
| | | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Persentase koleksi naskah kuno milik daerah yang dilestarikan | |
| Meningkatnya tata kelola arsip | Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah | Meningkatnya tertib pengelolaan arsip | Persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan arsip | Program Pengelolaan Arsip | Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap kebijakan Kearsipan (belum smart) | |
| | | | | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai Sakip | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota | Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah | |

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertangung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tabel 2.7
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2027

| No | Tujuan/Target/Indikator | Satuan | Baseline(2024) | Target Tahun 2025 | Target Tahun 2026 | Target Tahun 2027 | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat | Nilai | 77,26 | 77,5 | 77,75 | 78 | Mendukung SDG's Tujuan 1 |
| | Persentase peningkatan pemustaka | Persen | 42,12 | 10 | 10 | 10 | Mendukung SDG's Tujuan 1 |
| | Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah | Nilai | 90,02 | 90,03 | 90.04 | 90,05 | Mendukung SDG's Tujuan 16 |
| | Persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan arsip | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Mendukung SDG's Tujuan 16 |

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting dan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan

| No. | Urusan Pemerintahan | Permasalahan | Isu Strategis | Kegiatan Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urusan Perpustakaan | | | |
| | | Pengelolaan perpustakaan masih belum sesuai NSPK | Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kaidah dan standar yang baku (NSPK) | Pembinaan perpustakaan tingkat kab/kota |
| | | Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan | Optimalisasi kunjungan perpustakaan | - Pengembangan layanan perpustakaan elektronik<br>- Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial<br>- Pembudayaan gemar membaca |
| 2. | Urusan Kearsipan | | | |
| | | Masih terdapat pengelolaan arsip yang belum sesuai NSPK | Penguatan Sumber Daya Kearsipan | Pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan, akuisisi dan penyusutan arsip |
| | | Masih terdapat pengelolaan arsip secara konvensional | Digitalisasi arsip | Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan |

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -4 | -5 | -6 | -12 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **9.247.682.625** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **9.247.682.625** | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | **Persentase kunjungan perpustakaan** | | **1.177.013.450** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | **Persentase kunjungan perpustakaan** | | **1.177.013.450** | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | **Jumlah kunjungan perpustakaan** | | **1.154.578.350** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | **Jumlah kunjungan perpustakaan** | | **1.154.578.350** | |
| | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota** | | **723.125.450** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota** | | **723.125.450** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | Jml perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yg dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP | 25 Perpustakaan | 127.269.400 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | Jml perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yg dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP | 25 Perpustakaan | 127.269.400 | |
| | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jml perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kab/kota sesuai SNP di wilayah kab/kota sesuai kewenangannya | 10 perpustakaan | 175.000.000 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jml perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kab/kota sesuai SNP di wilayah kab/kota sesuai kewenangannya | 10 perpustakaan | 175.000.000 | |
| | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus tingkat Kabupaten/kota | | Jml perpustakaan khusus yg dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP | 10 perpustakaan | 15.609.450 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus tingkat Kabupaten/kota | | Jml perpustakaan khusus yg dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP | 10 perpustakaan | 15.609.450 | |
| | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kuota | | Jml tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota | 90 orang | 174.844.500 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kuota | | Jml tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kab/Kota | 90 orang | 174.844.500 | |
| | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | Jml data dan informasi perpustakaan | 1 Dokumen | 43.402.100 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | Jml data dan informasi perpustakaan | 1 Dokumen | 43.402.100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | Jml bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | 3000 Eksemplar | 162.000.000 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | Jml bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | 3000 Eksemplar | 162.000.000 | |
| | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Layanan elektronik | | Jml layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000 (ITSN: Information Technology Service Management) | 1 layanan | 25.000.000 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Layanan elektronik | | Jml layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000 (ITSN: Information Technology Service Management) | 1 layanan | 25.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jml lembaga yang mendapat pembinaan pembudayaan gemar membaca** | **10 perpustakaan** | 431.452.900 | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jml lembaga yang mendapat pembinaan pembudayaan gemar membaca** | **10 perpustakaan** | 431.452.900 | |
| | Pemilihan Duta Baca / Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Duta Baca / Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 3 orang | 137.325.000 | Pemilihan Duta Baca / Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Duta Baca / Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 3 orang | 137.325.000 | |
| | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | Jml layanan perpustakaan berbasis inklusi social di Wilayah | 10 perpustakaan | 50.000.000 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | Jml layanan perpustakaan berbasis inklusi social di Wilayah | 10 perpustakaan | 50.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca | | Jml orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemaar membaca tingkat kab/kota | 420 orang | 182.127.900 | Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca | | Jml orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemaar membaca tingkat kab/kota | 420 orang | 182.127.900 | |
| | Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat | | jml locus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidkan dasar dan Masyarakat | 5 Locus | 62.000.000 | Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat | | jml locus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidkan dasar dan Masyarakat | 5 Locus | 62.000.000 | |
| | **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno** | | Persentase koleksi naskah kuno milik daerah yang dilestarikan | **100 %** | **22.435.100** | **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno** | | Persentase koleksi naskah kuno milik daerah yang dilestarikan | **100 %** | **22.435.100** | |
| | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kab/Kota** | | | 2 | 22.435.100 | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kab/Kota** | | | 2 | 22.435.100 | |
| | Pengembangan, pengolahan dan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | | Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 2 ekslempar / buku | 22.435.100 | Pengembangan, pengolahan dan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | | Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 2 ekslempar / buku | 22.435.100 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | **8.070.669.175** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | **8.070.669.175** | **8.070.669.175** |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | **77,63 Indeks** | **7.605.313.175** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | **77,63 Indeks** | **7.605.313.175** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | **11 dok** | **111.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | **11 dok** | **111.000.000** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 dok | 40.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 dok | 40.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 20.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 20.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 11.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 11.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 laporan | 40.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 laporan | 40.000.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | **20 dokumen** | **4.244.071.000** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | **20 dokumen** | **4.244.071.000** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 25 orang/bulan | 4.217.071.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 25 orang/bulan | 4.217.071.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 12.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 12.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/tiwulanan/semesteran SKPD | 5 laporan | 15.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/tiwulanan/semesteran SKPD | 5 laporan | 15.000.000 | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah** | **2 laporan** | **12.000.000** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah** | **2 laporan** | **12.000.000** | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2 laporan | 12.000.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2 laporan | 12.000.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Laporan pelaksana tugas perangkat daerah yang disusun** | **32 laporan** | **730.612.150** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Laporan pelaksana tugas perangkat daerah yang disusun** | **32 laporan** | **730.612.150** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 36.403.400 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 36.403.400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 154.034.250 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 154.034.250 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 22.163.350 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 22.163.350 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 24 Paket | 97.913.750 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 24 Paket | 97.913.750 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket | 18.650.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket | 18.650.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen | 15.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen | 15.000.000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 laporan | 25.650.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 laporan | 25.650.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | 320.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | 320.000.000 | |
| | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | | Jml dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6 laporan | 20.000.000 | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | | Jml dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6 laporan | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 12 laporan | 20.797.400 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 12 laporan | 20.797.400 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **12 Dokumen** | **612.687.875** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **12 Dokumen** | **612.687.875** | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 2 unit | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 2 unit | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 2 unit | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 2 unit | | |
| | Pengadaan Mebel | | Jumlah paket mebel yang disediakan | 10 unit | 194.517.300 | Pengadaan Mebel | | Jumlah paket mebel yang disediakan | 10 unit | 194.517.300 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 6 unit | 205.089.975 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 6 unit | 205.089.975 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 213.080.600 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 213.080.600 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah dokumen laporan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **12 Laporan** | **1.026.013.750** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah dokumen laporan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **12 Laporan** | **1.026.013.750** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat | 12 Laporan | 3.993.750 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat | 12 Laporan | 3.993.750 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | 420.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | 420.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 31.150.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 31.150.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 570.870.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 570.870.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah** | **17 Unit** | **868.928.400** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah** | **17 Unit** | **868.928.400** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 17 unit | 299.998.400 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 17 unit | 299.998.400 | |
| | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah mebel yang dirawat | 30 unit | 30.000.000 | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah mebel yang dirawat | 30 unit | 30.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 30 unit | 103.880.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 30 unit | 103.880.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 2 paket | 435.050.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 2 paket | 435.050.000 | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | **Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan** | **48 PD** | **449.356.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | **Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan** | **48 PD** | **449.356.000** | |
| | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah OPD yang Patuh terhadap Kebijakan Pengelolaan Arsip** | **17 PD** | **171.200.000** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah OPD yang Patuh terhadap Kebijakan Pengelolaan Arsip** | **17 PD** | **171.200.000** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan | 20 berkas | 50.000.000 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan | 20 berkas | 50.000.000 | |
| | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 900 berkas | 45.000.000 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 900 berkas | 45.000.000 | |
| | Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kab/Kota | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 17 Lap | 76.200.000 | Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kab/Kota | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 17 Lap | 76.200.000 | |
| | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | **Peningkatan arsip statis yang dibuatkan sarana temu balik** | **3 Daftar** | **36.000.000** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | **Peningkatan arsip statis yang dibuatkan sarana temu balik** | **3 Daftar** | **36.000.000** | |
| | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | | Jumlah Daftar Salinan Otentik Naskah Asli arsip terjaga (Arsip Aset, Aset/Arsip Vital ) yang dikumpulkan dan di sampaikan kepada ANRI | | | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | | Jumlah Daftar Salinan Otentik Naskah Asli arsip terjaga (Arsip Aset, Aset/Arsip Vital ) yang dikumpulkan dan di sampaikan kepada ANRI | | | |
| | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | Jumlah Arsip Statis yang dikelola dan dibuat daftar temu balik | 500 Arsip | 36.000.000 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | Jumlah Arsip Statis yang dikelola dan dibuat daftar temu balik | 500 Arsip | 36.000.000 | |
| | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | **Jumlah arsip statis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN** | **12 daftar** | **242.156.000** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | **Jumlah arsip statis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN** | **12 daftar** | **242.156.000** | |
| | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah | 50 Pengguna | 32.156.000 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 50 Pengguna | 32.156.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah | 15 Laporan | 210.000.000 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah | 15 Laporan | 210.000.000 | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | **Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan** | **100 prosen** | **16.000.000** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | **Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan** | **100 prosen** | **16.000.000** | |
| | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | | **Jumlah berkas yang dinilai, ditetapkan dan dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 tahun** | **134 Berkas** | **16.000.000** | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | | **Jumlah berkas yang dinilai, ditetapkan dan dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 tahun** | **134 Berkas** | **16.000.000** | |
| | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 134 arsip | 16.000.000 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 134 arsip | 16.000.000 | |
| | **JUMLAH** | | | | **9.247.682.625** | **JUMLAH** | | | | **9.247.682.625** | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | N I H I L | | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam Asta Cita adalah delapan prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Asta Cita merupakan wujud implementasi langsung dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Berikut adalah uraian dari delapan prioritas nasional Asta Cita:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM):
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa:
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas:
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, dan Prestasi Olahraga:
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam:
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan:
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan:
8. Harmonisasi Lingkungan Hidup, Budaya, dan Toleransi Beragama:

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Adapun Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- Tujuan “Meningkatnya kegemaran membaca“ .
- Tujuan “Meningkatnya tata kelola arsip”

Sasaran

Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

- Sasaran “Meningkatnya layanan perpustakaan”
- Sasaran ”Meningkatnya tertib pengelolaan arsip“

dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

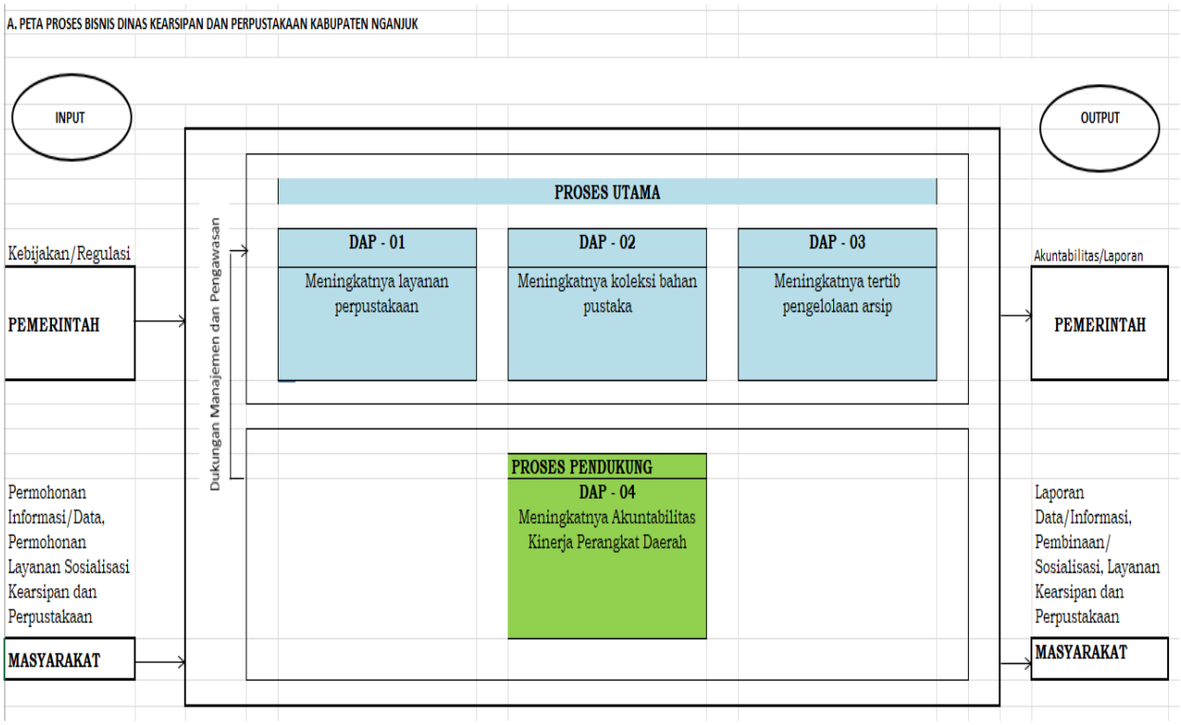
| Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Kinerja | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|
| Meningkatnya kegemaran membaca | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 77,75 |
| Meningkat nya tata kelola arsip | Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah | 90,04 |
| Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Kinerja | Target Tahun 2026 |
| Meningkatnya layanan perpustakaan | Persentase peningkatan pemustaka | 10 |
| Meningkatnya tertib pengelolaan arsip | Persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan arsip | 100 |

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk dan Indikatornya menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2025-2029. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2025-2029.

Tabel kerangka logis tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, cascading dan/atau crosscutting kinerja antar Unit Perangkat Daerah (Program Perangkat Daerah) :

PROSES BISNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK




## 3.3. Program dan Kegiatan

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat I | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya Layanan Perpustakaan | | | | 10 | 10 |
| | | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | | 77,5 | 78 |
| | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | | 60,11 | 60,20 |
| 2 | Meningkatnya tertib pengelolaan arsip | | | 80 | 100 | 100 |
| | | | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | 86 | 86,25 |
| | | | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | | 100 | 100 |
| | | | Indeks Hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah | | 90,03 | 90,04 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

| No. | Prioritas Daerah | Alokasi 2026 (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan kualitas pendidikan | Rp.1.177.013.450 |
| 2 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) | Rp.8.070.669.175 |

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2026 | Alokasi 2026 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya layanan perpustakaan | Persentase peningkatan pemustaka | 10 | Rp.1.177.013.450 |
| 2 | Meningkatnya tertib pengelolaan arsip | persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan arsip | 100 | Rp. 8.070.669.175 |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

O